



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK #bangga  
#melayani  
#bangsa

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## PENGADILAN TINGGI RIAU

# 2024



- •
  - •
  - •
  - •
  - •
- PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523



# SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau selama tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja untuk mewujudkan good governance dan accountability.

Secara keseluruhan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Riau yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di wilayah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 telah diupayakan secara optimal dan obyektif, namun masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak, untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Riau ditahun berikutnya yang lebih baik lagi.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan karyawan karyawan Pengadlan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Pekanbaru, 13 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



ASLI GINTING, S.H.,M.H.





# TENTANG PENGADILAN TINGGI RIAU

Pengadilan Tinggi Riau berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru - Riau. Pada awalnya Pengadilan Tinggi Riau merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982, Pengadilan Tinggi Riau didirikan di atas lahan seluas  $\pm$  5.000 M2 dengan luas bangunan 1.706 M2 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi propinsi Riau yang saat ini terdiri dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri yaitu :

- 01** Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA
- 02** Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
- 03** Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
- 04** Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
- 05** Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB
- 06** Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB
- 07** Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II
- 08** Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
- 09** Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II
- 10** Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II
- 11** Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II



# VISI

"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung"

# MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Riau.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau.

# NILAI NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidak berpihakan dan
8. Perlakuan yang sama di depan hukum





# PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN TINGGI RIAU



## KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : ASLI GINTING, S.H., M.H.  
 NIP : 195804041984031002  
 TTL : Karo, 04 April 1958  
 Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
 Pangkat : Pembina Utama (IV/e)  
 Pendidikan : S2 - Universitas 17 Agustus 1945

## RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2025 - Sekarang	Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Riau
2	2023 - 2024	Ketua Pengadilan Tinggi Manado
3	2021 - 2023	Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
4	2020 - 2021	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
5	2019 - 2020	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
6	2017 - 2019	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
7	2016 - 2017	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya
8	2012 - 2016	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
9	2010 - 2012	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
10	2008 - 2010	Ketua Pengadilan Negeri Makassar
11	2008 - 2008	Ketua Pengadilan Negeri Manado
12	2006 - 2008	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
13	2003 - 2006	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar
14	2002 - 2003	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
15	1999 - 2002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
16	1997 - 1999	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Balai
17	1992 - 1997	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga
18	1986 - 1992	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kabanjahe
19	1985 - 1986	Staf Pengadilan Negeri Binjai
20	1984	CPNS/Cakim Pengadilan Tinggi Surabaya

# PROFIL PIMPINAN



## WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.  
 NIP : 196110141982031003  
 TTL : Kuantan Singingi, 14 Oktober 1961  
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
 Pangkat : Pembina Utama (IV/e)  
 Pendidikan : S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung  
 Tahun 2014

## RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2024 s.d Sekarang	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
2	2023 - 2024	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
3	2021 - 2023	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
4	2019 - 2021	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
5	2017 - 2019	Ketua Pengadilan Negeri Batam
6	2016 - 2017	Ketua Pengadilan Negeri Depok
7	2014 - 2016	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
8	2013 - 2014	Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
9	2013 - 2013	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale
10	2009 - 2013	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
11	2006 - 2009	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
12	2000 - 2006	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
13	1996 - 2000	Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan
14	1993 - 1996	Cakim Pengadilan Negeri Padang
15	1983 - 1993	PNS Pengadilan Tinggi Padang
16	1982	CPNS Pengadilan Tinggi Padang

# HAKIM TINGGI

PENGADILAN TINGGI RIAU



**NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.**



**PETRIYANTI, S.H., M.H.**



**INANG KASMAWATI, S.H.**



**ASWIJON, S.H., M.H.**



**ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.**



**ASMAR, S.H., M.H.**



# HAKIM TINGGI

PENGADILAN TINGGI RIAU



**NOER ALI, S.H.**



**SETIA RINA, S.H., M.H.**



**Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.**



**RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.**



**MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.**



**YUS ENIDAR, S.H., M.H.**



# HAKIM TINGGI

PENGADILAN TINGGI RIAU



**TIROLAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.**



**DESBENERI SINAGA, S.H., M.H.**



**Y WISNU WICAKSONO, S.H.**



**YUZAIDA, S.H., M.H.**



**DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.**



**MIAN MUNTHE, S.H.**

## HAKIM TINGGI

PENGADILAN TINGGI RIAU



**SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.**



**SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.**



**LILIN HERLINA, S.H., M.H.**



**Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**

## HAKIM YUSTISIAL



**DIDIK TRISULISTYA, S.H., M.H.**



**ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, S.H.**



# HAKIM TINGGI AD HOC

PENGADILAN TINGGI RIAU



**TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.**



**Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.**



**HENDRI, S.H., M.H.**

# PROFIL PIMPINAN



## PANITERA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : R. SENO SOEHARJONO SANTOSO,  
S.H., M.H.

NIP : 19680228 199203 1 002

TTL : Semarang, 28 Februari 1968

Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Riau

Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)

Pendidikan : S2 Ilmu Hukum STIH IBLAM

## RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2024 - Sekarang	Panitera Pengadilan Tinggi Riau
2	2023 - 2024	Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya
3	2021 - 2023	Panitera Negeri Batam
4	2021	Panitera Pengadilan Negeri Dumai
5	2019 - 2021	Panitera Pengadilan Negeri Sumber
6	2017 - 2019	Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
	2016 - 2017	Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan
7	2012 - 2016	Panitera / Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan
8	2011 - 2012	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen
9	2009 - 2011	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palangkaraya
10	1999 - 2009	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
11	1993 - 1999	PNS Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
12	1992 - 1993	CPNS Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



# PROFIL PIMPINAN



## SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP.,  
S.H., M.M.

NIP : 19790221 200502 1 001

TTL : Solok Selatan, 21 Februari 1979

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau

Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)

Pendidikan : S2 Magister Management  
Universitas Andalas Padang

## RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	Agustus 2021 - Sekarang	Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau
2	Desember 2015 - Agustus 2021	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Padang
3	2010-2015	Kepala Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Padang
4	2008-2010	Staf Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung
5	2006-2008	Staf Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung
6	2005-2006	CPNS/Staf Pengadilan Negeri Lubuk Basung

# PERISTIWA PENTING TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI RIAU



## **PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2024**

Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Penjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama pada Tanggal 2 Januari 2024



## **PEMBINAAN TEKNIS OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DI PEKANBARU**

Ketua Mahkamah Agung RI melakukan Pembinaan untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 3(tiga) lingkungan peradilan sewilayah Provinsi Riau yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru 29 Agustus 2024



## **RAPAT KOMITE KEPUTUSAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melakukan Rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) untuk Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau yang sudah dilakukan asesmen, kegiatan ini dilakukan pada Tanggal 26 November 2024.



## **PENGHARGAAN ABHINAYA UPANGGA WISESA TAHUN 2024**

Bertempat di hotel grand mercure solo pada tanggal 5 desember 2024 direktorat jenderal badan peradilan umum menyerahkan penghargaan abhinaya wiseza tahun 2024, Pengadilan Tinggi Riau memperoleh 5 (lima) penghargaan dari 8 kriteria penilaian yang dilombakan.



# PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024



## PEMENANG PENILAIAN LAYANAN PENGADILAN/PTSP TAHUN 2024

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Peringkat I Penilaian Layanan Pengadilan/PTSP Tahun 2024 yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



## ROLE MODEL PIMPINAN TAHUN 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum., pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Role Model pada Pengadilan Tinggi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.



## PENILAIAN KINERJA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH TAHUN 2024

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Sukri Sulumin, S.H., M.H., pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi terbaik dalam pelaksanaan pengawasan daerah pada wilayah hukumnya.



**PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima Peringkat Terbaik II atas pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023.



**PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) TAHUN 2024**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Peringkat I Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



**PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) TAHUN 2024**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul untuk Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding.



**PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Peringkat I Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kategori Pagu 10 s.d 50 Miliar Periode Tahun Anggaran 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.





**PENILAIAN PENGGUNA DIGIPAY**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Peringkat I Satuan Kerja dengan Pengguna Digipay Terbaik Semester 1 Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru



**PENILAIAN PETUGAS SATUAN KERJA TERBAIK**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Petugas Satuan Kerja Terbaik atas nama EKA CHITRA MUVIRIANTI Semester 1 Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



**PENILAIAN SATUAN KERJA PEMBINA TERBAIK**

Pengadilan Tinggi Riau (400492) pada tanggal 15 Juli 2024 menerima penghargaan sebagai Prestasi Terbaik Membina Satuan Kerja Dibawahnya Dalam Pengelolaan DIPA 03 Tahun 2023 dengan Nilai Rata-rata 96.64% dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



**PENILAIAN SATUAN KERJA DENGAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPAW TERBAIK**

Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 11 Juni 2024 menerima penghargaan sebagai Terbaik Pertama Kualitas Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dengan Jumlah Satuan Kerja UAKPA 11 s.d 20 dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Riau.





### **PENILAIAN PENGGUNA DIGIPAY**

Pengadilan Tinggi Riau (400492) pada tanggal 08 Mei 2024 menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Peringkat I Perintis Pengguna Digipay Satu Terbanyak Triwulan I Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



### **PENILAIAN PENGGUNA DIGIPAY**

Pengadilan Tinggi Riau (400493) pada tanggal 08 Mei 2024 menerima Apresiasi sebagai Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Triwulan I Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



# PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024



## **PENILAIAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP (EIS)**

Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima penghargaan Terbaik II sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian Nilai Tertinggi Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Dengan Perkara > 2000 dari Dirjen Badilum



## **PENILAIAN ROLE MODEL KETUA PENGADILAN NEGERI**

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H. pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Role Model Ketua Pengadilan Negeri Terbaik Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Kelas II Dari Dirjen Badilum



## **PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Terbaik Ke V Penilaian Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kelas IA dari Dirjen Badilum



**PENILAIAN BELANJA DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) TAHUN 2024.**

Pengadilan Negeri Rengat (098860) menerima penghargaan sebagai Peringkat III Belanja Dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



**PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



**PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Berpredikat Sempurna Semester I Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



**PENILAIAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP (EIS)**

Pengadilan Negeri Rengat menerima penghargaan Terbaik VII sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian Nilai Tertinggi Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 Kategori Pengadilan Negeri Kelas II Dengan Perkara 501 s/d 1.000 dari Dirjen Badilum





**PENILAIAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH**

Pengadilan Negeri Bangkinang menerima penghargaan Sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul untuk Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB Tahun 2024 dari Dirjen Badilum.



**PENILAIAN LAYANAN PENGADILAN /PTSP TAHUN 2024**

Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Peringkat Terbaik I Penilaian Pelayanan Pengadilan (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Kelas II Tahun 2024 dari Dirjen Badilum



**PENILAIAN ROLE MODEL SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KELAS IB**

Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang Immanuel Rismawati, S.E., Ak., M.Si. pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Role Model Sekretaris Terbaik Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dari Dirjen Badilum.



**PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Negeri Bangkinang (400141) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Peringkat V dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Di Bawah 10 Miliar Semester I TA 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru



**PENILAIAN PETUGAS SATUAN KERJA TERBAIK**

Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Petugas Satuan Kerja Terbaik atas nama Alichia Diah Octiningtyas Semester 1 Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru



**PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) TAHUN 2024**

Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Terbaik Ke II Penilaian Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Kelas II dari Dirjen Badilum.



**PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (477343) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Peringkat IV dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Di Bawah 10 Miliar Semester I TA 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru



**PENILAIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERKARA**

Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Terbaik I Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kelas II dari Dirjen Badilum





### **PENILAIAN ROLE MODEL SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KELAS II**

Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Andry Kusuma Putra, S.E. pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Role Model Sekretaris Terbaik Pada Pengadilan Negeri Kelas II dari Dirjen Badilum.



### **PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Negeri Tembilahan (098874) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan Dengan Nilai IKPA Sempurna kategori Pagu di Bawah 5 Miliar Semester I TA 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



### **PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

Pengadilan Negeri Tembilahan (099217) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan Dengan predikat IKPA Sangat Baik Semester I TA 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



**- PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI RIAU -**





**- KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI RIAU -**

## DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN .....	5
PROFIL PIMPINAN .....	6
HAKIM TINGGI.....	6
PROFIL PIMPINAN .....	12
PERISTIWA PENTING TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI RIAU.....	13
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024 .....	15
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024 .....	19
DAFTAR ISI .....	26
DAFTAR TABEL .....	28
DAFTAR GAMBAR.....	29
.....	30
A.    KEBIJAKAN UMUM.....	31
B.    STRUKTUR ORGANISASI .....	32
BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKA.....	33
A.    KEADAAN PERKARA.....	34
1.    KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA.....	34
2.    KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.....	37
3.    KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI .....	37
4.    KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI .....	38
B.    PENYELESAIAN PERKARA.....	38
1.    JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS .....	38
2.    JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU .....	39
3.    JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK .....	41
4.    JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI .....	42
5.    JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI .....	43
C.    PROGRAM PRIORITAS NASIONAL .....	43
1.    POSBAKUM.....	43
2.    SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU .....	44
3.    PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	44
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....	46
A.    KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA .....	47
1.    SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI RIAU .....	47
2.    SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU .....	50
3.    SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN.....	52
4.    SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN .....	52
5.    PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA .....	52
B.    MUTASI DAN PROMOSI .....	53



C.	PENSIUN.....	55	
D.	DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT) .....	55	• •
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....		57	• •
A.	PENGELOLAAN KEUANGAN.....	58	• •
1.	REALISASI DIPA 01 .....	58	
2.	REALISASI DIPA 03 .....	59	
3.	REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) .....	60	
B.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	60	
1.	TANAH .....	61	
2.	TANAH & GEDUNG.....	61	
3.	KENDARAAN DINAS .....	66	
4.	MESIN NON TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) .....	66	
5.	MESIN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) .....	67	
C.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	67	
1.	IMPLEMENTASI E-COURT .....	67	
2.	IMPLEMENTASI SIPP.....	68	
3.	IMPLEMENTASI e-BERPADU.....	68	
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....		70	
A.	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	71	
B.	SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH).....	71	
C.	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	72	
D.	INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	73	
BAB VI PENGAWASAN.....		74	
A.	INTERNAL.....	75	
1.	PENGAWASAN DAERAH .....	75	
2.	PENGAWASAN BIDANG.....	78	
3.	PENANGANAN PENGADUAN .....	79	
4.	EVALUASI.....	80	
BAB VII PENUTUP.....		81	
A.	KESIMPULAN.....	82	
B.	SARAN .....	83	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pidana Biasa dan Pidana Khusus Pengadilan Tingkat Pertama .....	34
Tabel 2. Perkara Perdata dan Perdata Khusus Pengadilan Tingkat Pertama .....	36
Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	37
Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	37
Tabel 5.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	38
Tabel 6. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2024.....	38
Tabel 7. Jumlah sisa perkara Pidana Tingkat Pertama yang diputus tahun 2024 .....	39
Tabel 8. Jumlah sisa perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus tahun 2024 .....	39
Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu .....	40
Tabel 10. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu .....	40
Tabel 11. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK .....	41
Tabel 12. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi .....	42
Tabel 13. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	43
Tabel 14. Posbakum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau .....	44
Tabel 15. Sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	44
Tabel 16. Perkara prodeo di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	44
Tabel 17. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau .....	47
Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau .....	50
Tabel 19. SDM berdasarkan kelompok Golongan .....	52
Tabel 20. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	52
Tabel 21. Penghargaan Satya Lencana .....	53
Tabel 22. Mutasi masuk PT Riau .....	53
Tabel 23. Mutasi Keluar dari PT Riau .....	54
Tabel 24. Promosi & Mutasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau .....	54
Tabel 25. Pensiun di Pengadilan Tinggi Riau .....	55
Tabel 26. Pensiun Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau .....	55
Tabel 27. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis.....	56
Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01 .....	58
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03.....	59
Tabel 30. Realisasi PNBPN Tahun 2024.....	60
Tabel 31. Daftar Tanah .....	61
Tabel 32. Daftar PSP Tanah dan Gedung.....	61
Tabel 33. Daftar PSP Kendaraan dinas.....	66
Tabel 34. Daftar PSP Mesin Non TIK.....	66
Tabel 35. Daftar PSP Mesin TIK .....	67
Tabel 36. Implementasi E-Court Tahun 2024 .....	67
Tabel 37. Rekapitulasi Penghargaan Predikat WBK/WBBM .....	71
Tabel 38. Rekapitulasi Penilaian AMPUH Tahun 2024 .....	72
Tabel 39. Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum .....	72
Tabel 40. Inovasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau.....	73
Tabel 41. Pengawasan daerah Tahun 2024 .....	76
Tabel 42. Penanganan Pengaduan.....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau .....	32
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau .....	32
Gambar 3. Implementasi Evaluasi Implementasi SIPP Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 .....	68





PENGADILAN TINGGI RIAU

PENGADILAN TINGGI  
RIAU



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Tinggi Riau sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan kepada Hakim-Hakim dan Pegawai baik di Pengadilan Riau sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Riau membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Riau, yang meliputi:

1. PN Pekanbaru Kelas IA
2. PN Dumai Kelas IA
3. PN Bangkinang Kelas IB
4. PN Pelalawan Kelas II
5. PN Siak Sri Indrapura Kelas II
6. PN Rengat Kelas II
7. PN Bengkalis Kelas II
8. PN Pasir Pengaraian Kelas II
9. PN Tembilahan Kelas II
10. PN Rokan Hilir Kelas II
11. PN Teluk Kuantan Kelas II

Setiap Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.

Pengadilan Tinggi Riau dan satker di bawahnya tetap berupaya

meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam bentuk:

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau Memperoleh penghargaan kategori terbaik Juara III lomba PTSP dan Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh penghargaan kategori terbaik Juara Harapan I lomba PTSP dari Dirjen Badan Peradilan Umum Tahun 2023.
2. Penerapan aplikasi *e-Court* yang secara terus menerus melakukan pembaharuan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, adanya fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *E-Court* pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan. Selain itu aplikasi *e-Court* memiliki fitur E-Litigation yang merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (online) pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan dilakukan secara elektronik. dalam hal ini sidang masih menerapkan konsep

pembuktian langsung di persidangan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau dan beberapa Pengadilan Negeri dibawahnya telah mengikuti penilaian Zona Integritas

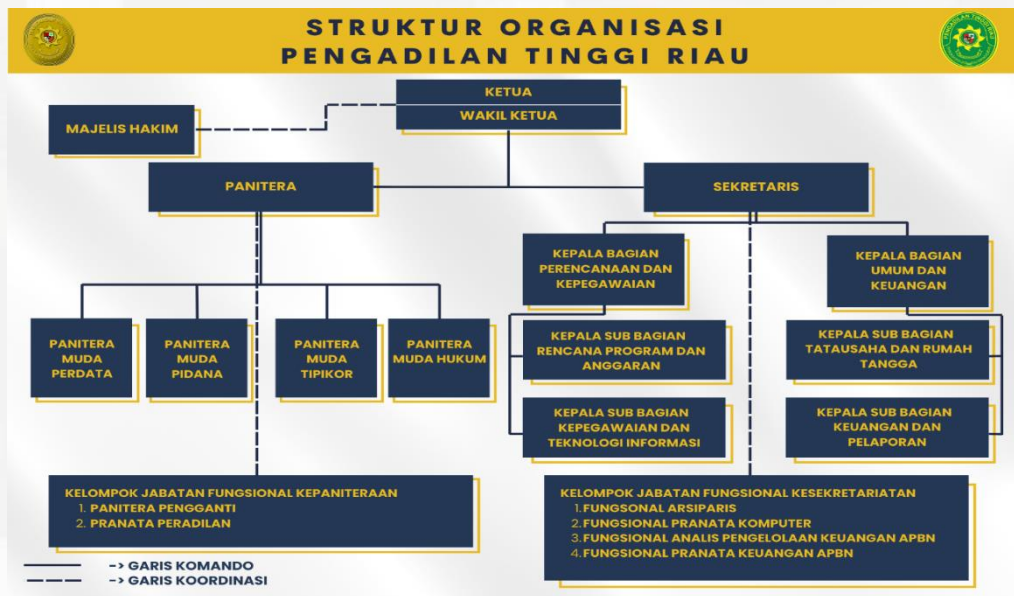
untuk predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Bangkinang memperoleh prediket Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

## B. STRUKTUR ORGANISASI

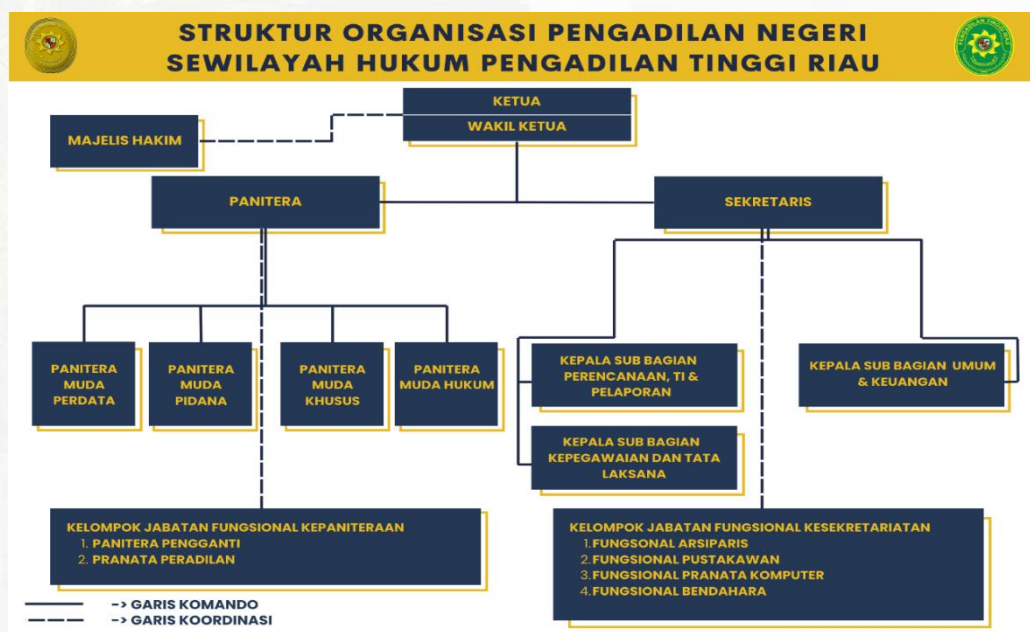
Struktur Organisasi pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau







MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa



# BAB II

## KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA



PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523











## 2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2024	Sisa Tahun 2024	% Putus
Perdata	10	216	226	-	211	15	93,4%
Pidana Biasa	65	889	954	-	868	86	91,0%
Pidana Anak	0	29	29	-	28	1	96,6%
Tipikor	1	24	25	-	18	7	72,0%
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>1158</b>	<b>1234</b>	<b>0</b>	<b>1125</b>	<b>109</b>	<b>91,16%</b>

## 3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Berikut ini rincian keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Th. 2024	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2024
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	51	56
		Perdata	54	32
		Pidana Khusus	15	14
		Perdata Khusus	85	34
2	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	14	7
		Perdata	27	13
3	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	29	38
		Perdata	9	6
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	168	111
		Perdata	10	6
5	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	37	38
		Perdata	1	-
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	10	14
		Perdata	14	12
7	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	40	24
		Perdata	7	5
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	18	9
		Perdata	2	2
9	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	36	28
		Perdata	6	1
10	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	78	67
		Perdata	11	9
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	6	1
		Perdata	42	23

#### 4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Berikut ini rincian keadaan perkara Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 5.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No.	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Th. 2024	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus Di Tahun 2024
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	65	62
		Perdata	21	5
		Pidana Khusus	12	7
		Perdata Khusus	-	-
2	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	14	23
		Perdata	3	1
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	39	18
		Perdata	2	3
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	53	34
		Perdata	2	3
5	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	12	11
		Perdata	1	-
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	26	24
		Perdata	2	4
7	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	74	50
		Perdata	2	4
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	22	19
		Perdata	-	1
9	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	29	19
		Perdata	-	1
10	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	87	81
		Perdata	2	2
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	1	0
		Perdata	2	1

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 yang pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum diputus Tahun 2024

Tabel 6. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 Yang Diputus Th. 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
Perdata	10	10	100%
Pidana Biasa	65	65	100%
Pidana Anak	0	0	100%
Tipikor	1	1	100%
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>



Tabel 7. Jumlah sisa perkara Pidana Tingkat Pertama yang diputus tahun 2024

No	Satuan Kerja	Pidana			Pidana Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Pekanbaru	180	180	100%	22	22	100%
2	PN Dumai	47	47	100%	-	-	-
3	PN Bangkinang	99	99	100%	-	-	-
4	PN Pelalawan	62	62	100%	1	1	100 %
5	PN Siak	63	63	100%	-	-	-
6	PN Rengat	70	70	100%	-	-	-
7	PN Bengkalis	165	165	100%	-	-	-
8	PN Pasir Pengaraian	89	89	100%	2	2	100 %
9	PN Rokan Hilir	67	67	100%	-	-	-
10	PN Tembilahan	42	42	100%	-	-	-
11	PN Teluk Kuantan	48	48	100%	1	1	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Tabel 8. Jumlah sisa perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus tahun 2024

No	Satuan Kerja	Perdata			Perdata Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Pekanbaru	135	135	100%	22	22	100%
2	PN Dumai	15	15	100%	-	-	-
3	PN Bangkinang	57	57	100%	-	-	-
4	PN Pelalawan	25	25	100%	-	-	-
5	PN Siak	29	29	100%	-	-	-
6	PN Rengat	4	4	100%	-	-	-
7	PN Bengkalis	-	-	-	-	-	-
8	PN Pasir Pengaraian	16	16	100%	-	-	-
9	PN Rokan Hilir	23	23	100%	-	-	-
10	PN Tembilahan	8	8	100%	-	-	-
11	PN Teluk Kuantan	17	17	100%	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di

pengadilan tingkat pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2024	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
<b>Pidana Biasa</b>	868	868	0	100%
<b>Pidana Anak</b>	28	28	0	100%
<b>Perdata</b>	211	211	0	100%
<b>Tipikor</b>	18	18	0	100%
<b>Jumlah</b>	<b>1125</b>	<b>1125</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Tabel 10. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2024	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu		
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	1457	1454	3	99,8%		
		Perdata	864	762	102	88,2%		
		Pidana Khusus	74	74	0	100%		
		Perdata Khusus	129	73	24	56,6%		
		2	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	384	384	0	100%
				Perdata	62	55	7	88,7%
Pidana Khusus	8			8	0	100%		
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	714	714	0	100%		
		Perdata	167	135	32	80,83%		
		Pidana Khusus	29	29	0	100%		
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	844	837	7	99,2%		
		Perdata	227	203	24	89,4%		
		Pidana Khusus	33	33	0	100%		
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	649	649	0	100%		
		Perdata	115	113	2	98,2%		
		Pidana Khusus	9	9	0	100%		
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	392	392	0	100%		
		Perdata	58	50	8	86,2%		
		Pidana Khusus	11	11	0	100%		
7	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	374	374	0	100%		
		Perdata	140	140	0	100%		
		Pidana Khusus	6	6	0	100%		
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	783	783	0	100%		
		Perdata	278	261	17	93,9%		
		Pidana Khusus	16	16	0	100%		
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	345	345	0	100%		
		Perdata	93	93	0	100%		
		Pidana Khusus	9	9	0	100%		

10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	460	460	0	100%
		Perdata	157	146	11	92,99%
		Pidana Khusus	21	21	0	100%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	230	230	0	100%
		Perdata	62	55	7	88,7%
		Pidana Khusus	19	19	0	100%

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara di tahun 2024 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 11. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Perkara PN Yang Putus Th. 2024 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara PN Yang Putus Th. 2024 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PN Pekanbaru	Pidana	1.457	1.366	93,75 %	1.406	96,50%	1.392	95,54 %
		Perdata	864	776	89,817 %	810	93,75%	843	97,57 %
		Pidana Khusus	74	49	66,22 %	59	79,73%	62	83,78 %
		Perdata Khusus	129	0	0	44	67,50%	0	0
2	PN Dumai	Pidana	384	338	88,02 %	355	92,45%	370	96,35 %
		Perdata	62	51	82,26 %	53	85,48%	59	95,16 %
		Pidana Khusus	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	PN Bangkinang	Pidana	1140	1109	97,28 %	1126	98,77%	1102	96,66 %
		Perdata	169	142	84,02 %	142	84,02%	167	98,81 %
		Pidana Khusus	29	28	96,55 %	29	100,00 %	28	96,55 %
4	PN Bengkalis	Pidana	844	616	73%	693	82,1%	821	97,3%
		Perdata	227	209	92,1%	218	96%	227	100,00 %
		Pidana Khusus	33	22	66,7%	23	69,7%	32	97,00 %
5	PN Rengat	Pidana	374	258	69%	407	108,82 %	373	99,73 %
		Perdata	29	24	82,75 %	23	79,31%	0	0,00%
		Pidana Khusus	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6	PN Pasir Pangaraian	Pidana	783	680	86,85 %	743	94,89%	709	90,55 %
		Perdata	278	267	96,04 %	271	97,48%	276	99,28 %
		Pidana Khusus	16	12	75%	14	87,5%	0	0,0%



7	PN Tembilahan	Pidana	345	308	89.3%	327	94.7%	343	99.4%
		Perdata	93	87	94.0%	91	97.8%	93	100.0 %
		Pidana Khusus	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	PN Pelalawan	Pidana	392	367	93,62 %	382	97,44%	368	93,87 %
		Perdata	58	35	60,34 %	44	75,86%	56	96,55 %
		Pidana Khusus	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	PN Siak Sri Indrapura	Pidana	377	327	86.7%	341	90.5%	348	92.3%
		Perdata	157	151	96.17 %	153	97.45%	157	100.0 %
		Pidana Khusus	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	PN Rokan Hilir	Pidana	628	481	76.59 %	550	87.58%	609	96.97 %
		Perdata	117	106	90,59 %	111	94,87%	111	94,87 %
		Pidana Khusus	-	-	0,00%	-	0,00%	-	00,0%
11	PN Teluk Kuantan	Pidana	230	160	70.0%	195	85.0%	230	100.0 %
		Perdata	36	26	72.00 %	31	86	34	94
		Pidana Khusus	19	18	95.0%	19	100.0%	19	100.0 %

#### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan

penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Berikut ini jumlah perkara perdata tahun 2024 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang berhasil mediasi.

Tabel 12. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Th. 2024	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	224	15	200	3	6
2	Pengadilan Negeri Dumai	28	2	26	0	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	82	5	73	1	3
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	31	1	26	1	3
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	45	1	39	1	4
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	35	-	29	0	3
7	Pengadilan Negeri Rengat	7	-	-	-	-
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	26	3	22	1	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	10	2	7	0	2

10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	35	2	31	0	2
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	11	1	10	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>534</b>	<b>32</b>	<b>463</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

## 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). Berikut ini jumlah perkara pidana anak Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang berhasil melakukan diversifikasi.

Tabel 13. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Th. 2024	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diversifikasi Th. 2024	Status Keberhasilan Diversifikasi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	24	8	1	7	16	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	9	0	0	0	0	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	30	6	0	0	0	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	33	6	1	5	21	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	9	2	1	1	0	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	10	2	0	2		
7	Pengadilan Negeri Rengat	6	0	0	0	0	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	14	4	3	1	0	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	9	2	0	1	1	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	21	2	2	0	0	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	18	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>2</b>

## C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

### 1. POSBAKUM

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan

advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun pada tahun 2024.

Tabel 14. Posbakum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Rp 44,000,000	Rp 44,000,000	100%	362
2	Pengadilan Negeri Dumai	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100%	151
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100%	196
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100%	204
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Rp 44,000,000	Rp 44,000,000	100%	111
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	100%	406
7	Pengadilan Negeri Rengat	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	100%	61
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	100%	305
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	100%	55
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	100%	155
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	100.00	30
<b>Jumlah</b>		<b>Rp364.000.000</b>	<b>Rp 364.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.036</b>

## 2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu

menangani kendala tersebut digalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Berikut data layanan sidang di luar gedung Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

Tabel 15. Sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Zitting Plaatz	Lokasi Sidang Zitting Plaatz	Jumlah Perkara Diselesaikan Di Zitting Plaatz Th. 2024
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	2	Duri, Mandau	0
			Selatpanjang, Kab Kepulauan Meranti	162
2	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	32	Pasir Pengaraian	32

## 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses

berperkara di pengadilan. Berikut data Prodeo pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 16. Perkara prodeo di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2024	Realisasi Anggaran Prodeo		
			Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	3	4.690.000	440.000	9.38%
2	Pengadilan Negeri Dumai	0	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	2	570.000	570.000	100%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	2	759.000	759.000	100%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	-	-	-
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	6	634.000	588.810	92,87%
7	Pengadilan Negeri Rengat	0	-	-	-



8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	-	-	-
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	-	-	-
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	4	3.350.000	473.000	14.11 %
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>10.003.000</b>	<b>2.830.810</b>	<b>28,30%</b>



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



**BerAKHLAK** #bangga  
#melayani  
#bangsa

# BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

# BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

### A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada beberapa pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi, namun masih ada Pengadilan Negeri yang mengalami kekosongan pada beberapa formasi

jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf atau pelaksana. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

#### 1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI RIAU

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Hakim, 3(tiga) orang Hakim Adhoc,

63 (enam puluh tiga) ASN dan 7 (tujuh) orang tenaga honorer/PPNPN. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Riau dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.	Ketua	Jumlah Hakim Tinggi 26 Orang
2	Drs. SYAHLAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	NELSON SAMOSIR, S.H., M.H	Hakim Tinggi	
4	PETRIYANTI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
5	INANG KASMAWATI, S.H.	Hakim Tinggi	
6	ASWIJON, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
7	ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
8	ASMAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
9	NOER ALI, S.H.	Hakim Tinggi	
10	SETIA RINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
11	Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
12	RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
13	MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
14	YUS ENIDAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
15	TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.	Hakim Tinggi	
16	DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
17	Y WISNU WICAKSONO, S.H.	Hakim Tinggi	
18	YUZAIDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
19	SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
20	LILIN HERLINA, S.H., M.H	Hakim Tinggi	
21	DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
22	SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
23	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
24	MIAN MUNTE, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
25	DIDIK TRISULISTYA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
26	ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, S.H.	Hakim Tinggi	
27	TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	Jumlah Hakim Adhoc 3 Orang
28	Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	
29	HENDRI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	



30	R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.	Panitera	Jumlah Pejabat Struktural 12 Orang
31	T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M	Sekretaris	
32	JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	
33	I.A.N. RATNAYANI, S.H., M.H.	Panmud. Perdata	
34	YUNITA BANGUN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
35	NETTY RIAMA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
36	NASIB SAGALA, S.H.	Panitera Pengganti	
37	DENNI SEMBIRING, S.H., M.H	Panitera Pengganti	
38	DIYAH FAJAR SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
39	HASAN BASRI, S.H., M.H	Panitera Pengganti	
40	M. JAMALIS, S.H.	Panitera Muda Pidana	
41	MANIDAR, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
42	SUYATNO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
43	RUSTAM, S.H.	Panitera Pengganti	
44	ROBY HIDAYAT, S.T., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Panitera Pengganti Sebanyak 22 Orang
45	DERSIMA HARAHAHAP, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
46	REHULINA BR BRAHMANA, S.H.	Panitera Pengganti	
47	SINTA ROIDA RITONGA, S.H.	Panitera Pengganti	
48	MAINIZAR, S.H.	Panitera Pengganti	
49	MELIANA, S.H.	Panitera Pengganti	
50	JONATHAN SINAGA, S.H	Panitera Pengganti	
51	JUSLAK ARTHUR LANIFANIK BALUKH, S.H.	Panitera Pengganti	
52	TETI ANGGRAINI, S.H	Panitera Pengganti	
53	ROSDIANA SITORUS, S.H.	Panitera Pengganti	
54	AMIRIN, S.H.	Panitera Pengganti	
55	YUSNIDAR, S.H.	Panmud Hukum	
56	MF. EVA JUNIAR SIMAMORA, S.H.	Panitera Pengganti	
57	SUNARIYAH, S.H.	Panitera Pengganti	
58	SINTA HERAWATI, S.H.	Panitera Pengganti	
59	AZWIR, S.H.	Panitera Pengganti	
60	INDAH MUHARANI, S.T.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Jumlah Fungsional Tertentu orang
61	ROMA TUA JUWYTA SIHOMBING, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
62	ZULHELMI, S.H.	Panitera Pengganti	
63	LINDA SRIYANTI	Panitera Pengganti	
64	MELLA ROSARIA INDAH, S.H., M.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	
65	EKA CHITRA MURVIRIANTI, S.E.	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan / Mahir	
66	MUHADI, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
67	BETHARIA OKTAVIANI, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
68	MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	
69	DARWIS M., S.Kom	Operator-Penata Layanan Operasional	
70	ANDI ANUGRA, S.H	Klerek-Penata Keprotokolan	
71	ISRA FILONA, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	

72	JUSNIWATI	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga non Teknis orang
73	FADHLIAMIN, S.SI.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
74	ANGGI HAULANI ADHA, S.E., M.M.J	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	
75	ROMMY SAPUTRA, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	
76	INTAN MAHDALENA, S.Sos	Operator-Penata Layanan Operasional	
77	NOVALIA SIMAMORA, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	
78	KAMALUDDIN	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	
79	PERMAIZAL	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	
80	MELGISAPUTRA DWI NANDA, S.Kom., M.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
81	KATARINA HUTAPEA, S.Si.	Operator-Penata Layanan Operasional	
82	YUDI OKTAVIANUS, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	
83	FAJRUL AMNI, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	
84	ARSHITA FEBRINA SILALAH, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	
85	RISKON AS SHIDDIQIE, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	
86	ADETIA PRATAMA, A.Md	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	
87	ARINI PUSPASARI, A.Md.	Klerek - Pengelola Layanan Pengadaan	
88	ASYURA TRI RAHMADHANI, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	
89	FELIN STEFANI LUMBANTOBING, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
90	YESICA WINDAYANA MALAU, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
91	HENDRA SETIAWAN, S.Ap.	Arsiparis Pertama	
92	YUDHI DARMAWAN, S.E.	Perencana Ahli Pertama	
93	SAMIDI	PPNPN	
94	HADI SUTIANTO	PPNPN	
95	SYAMBUDI	PPNPN	
96	M. SYAHRIR	PPNPN	
97	ROTAL NGALAMIN	PPNPN	
98	MUDORI	PPNPN	
99	NUROKHIM	PPNPN	

## 2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Rincian jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau

No	Jabatan	PN Pekanbaru	PN Dumai	PN Bangkinang	PN Bengkalis	PN Rokan Hilir	PN Pelalawan	PN Rengat	PN Pasir Pengaraian	PN Tembilahan	PN Siak Sri Indrapura	PN Teluk Kuantan
1	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Wakil Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Hakim	14	5	6	9	4	4	5	5	5	4	6
4	Hakil Adhoc Tipikor	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hakim Adhoc PHI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hakim Adhoc Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Panitera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Panmud Pidana	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
10	Panmud Perdata	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
11	Panmud Hukum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Panmud Tipikor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Panmud PHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Panmud Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Panitera Pengganti	12	4	4	2	2	1	1	2	0	1	2
16	Jurusita/Jurusita Pengganti	8	2	3	2	1	2	1	4	1	1	1
17	Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	KA. Sub. Bag PTIP	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
19	Ka. Sub. Bag Umum Dan Keuangan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
20	Ka. Sub. Bag Kepegawaian Dan Ortala	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
21	Tenaga Non Teknis	21	11	0	7	8	8	8	8	8	8	4



22	PPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tenaga Honoror	16	12	9	11	9	12	7	8	11	7	11
	<b>Jumlah Personil</b>	<b>92</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
	Jumlah Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc	87										
	Jumlah Non Hakim	341										

### 3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

Jumlah Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

sebanyak 414 Orang, Berikut rincian Jumlah hakim dan pegawai berdasarkan kelompok Golongan.

Tabel 19. SDM berdasarkan kelompok Golongan

No	Satuan Kerja	Golongan IV (orang)	Golongan III (orang)	Golongan II (orang)	Golongan I (orang)
1	Pengadilan Tinggi Riau	42	40	5	0
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	20	51	5	0
3	Pengadilan Negeri Dumai	9	17	4	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	6	22	4	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	4	20	5	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	20	3	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	3	21	1	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	2	20	3	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2	21	5	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	2	17	4	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	17	3	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	16	3	0
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>273</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

### 4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

Berikut rincian Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 berdasarkan kelompok Pendidikan Tahun 2024.

Tabel 20. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Tingkat Pendidikan						
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1	Pengadilan Tinggi Riau	4	34	43	7	0	0	4
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	0	27	43	5	0	0	1
3	Pengadilan Negeri Dumai	0	5	18	5	0	0	2
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	0	10	17	4	0	0	1
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	7	17	4	0	0	1
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	4	18	3	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	8	15	1	0	0	1
8	Pengadilan Negeri Rengat	0	3	19	1	0	0	2
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	6	17	3	0	0	2
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	2	16	3	0	0	2
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	4	15	3	0	0	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	6	11	3	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>82</b>	<b>206</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

### 5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung Telah memberikan tanda penghargaan kepada Hakim dan pegawai Mahkamah Agung yang telah berbakti selama 8 tahun, 16 Tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun lebih secaraterus menerus dengan

menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian. Berikut rincian jumlah penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 21. Penghargaan Satya Lencana

No	Satuan Kerja	Penghargaan				
		Satya Lencana Karya Satya XXX (Orang)	Satya Lencana Karya Satya XX (Orang)	Satya Lencana Karya Satya X (Orang)	Karya Satya Sewindu (Orang)	Karya Satya Dwiwindu (Orang)
1	Pengadilan Tinggi Riau	2	1	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	0	4	0	0	0
3	Pengadilan Negeri Dumai	1	0	0	0	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	1	1	0	0	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	1	2	1	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	1	2	0	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	1	0	0	0	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	1	2	0	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	1	1	0	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	0	0	0	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

## B. MUTASI DAN PROMOSI

Berikut rincian promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 22. Mutasi masuk PT Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan ( Mutasi Dari )
1	Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PT. Kepulauan Riau
2	ASMAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Padang
3	TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.	Hakim Tinggi	PT. Bangka Belitung
4	DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Palangkaraya
5	DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Bengkulu
6	SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Kalimantan Timur
7	MIAN MUNTE, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Ambon
8	DIDIK TRISULISTYA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Mahkamah Agung R.I.
9	ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, S.H.	Hakim Tinggi	Mahkamah Agung R.I.
10	R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.	Panitera	PT. Palangkaraya
11	NETTY RIAMA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PN Stabat
12	DENNI SEMBIRING, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PN Pekanbaru
13	MANIDAR, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PN Rengat
14	RUSTAM, S.H.	Panitera Pengganti	PN Pelalawan
15	REHULINA BR BRAHMANA, S.H.	Panitera Pengganti	PN Stabat
16	SINTA ROIDA RITONGA, S.H.	Panitera Pengganti	PN Pematang Siantar
17	MAINIZAR, S.H.	Panitera Pengganti	PN Pematang Siantar
18	MELIANA, S.H.	Panitera Pengganti	PN Payakumbuh
19	ROSDIANA SITORUS, S.H.	Panitera Pengganti	PN Pekanbaru
20	ZULHELMI, S.H.	Panitera Pengganti	PN Muaro
21	LINDA SRIYANTI	Panitera Pengganti	PN Pasaman Barat
22	ZUBIR AMRI, S.H.	Panitera Pengganti	PN Tembilahan
23	ARSHITA FEBRINA SILALAH, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	PN Kuningan
24	RISKON AS SHIDDIQIE, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	



Tabel 23. Mutasi Keluar dari PT Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Keluar ke)
1	Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Pengadilan Tinggi Surabaya
2	DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Surabaya
3	H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Bandung
4	JON EFFREDDI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Padang
5	ADMIRAL, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Padang
6	Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengadilan Tinggi Makassar
7	HERMINA SILABAN, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Medan
8	PARINGATAN SARAGIH, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Medan
9	SESILIYA RAHAYU, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
10	AMALIA KHOIRUNNISA, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tabel 24. Promosi &amp; Mutasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Promosi / Mutasi Masuk (Orang)	Jumlah Promosi / Mutasi Keluar (Orang)
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Hakim Karir	7	6
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	3	4
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	8	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	Hakim Karir	0	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	3	4
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Hakim Karir	3	6
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	3	5
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	3	3
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Hakim Karir	2	0
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	3	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Hakim Karir	0	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Hakim Karir	0	5
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	2	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	2	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	Hakim Karir	1	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	2	1
		Pelaksana	0	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Hakim Karir	1	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	1

		Fungsional	2	0
		Pelaksana	3	2
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Hakim Karir	1	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	4	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	2	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Hakim Karir	1	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	1	2
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	4
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Hakim Karir	2	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Struktural (Non Hakim)	3	4
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0

### C. PENSIUN

Berikut rincian pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 25. Pensiun di Pengadilan Tinggi Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
2.		Hakim Tinggi	Pensiun Normal
3.		Panitera Pengganti	Pensiun Normal
4.		Panitera Pengganti	Pensiun Normal

Tabel 26. Pensiun Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Pensiun di Tahun 2024
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
2	Pengadilan Negeri Dumai	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	1
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	1
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0
	Jumlah	3

### D. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIK YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis dan non teknis peradilan yang profesional, berintegritas dan

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini diarahkan untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan, peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti diklat teknis

dan diklat menpin pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 27. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis

No.	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Non Teknis
1	Pengadilan Tinggi Riau	0	1
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	15	14
3	Pengadilan Negeri Dumai	5	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	6	3
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	6	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	5	3
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	1	1
8	Pengadilan Negeri Rengat	6	3
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	5	3
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	5	2
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	9	1
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	5	2
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>33</b>





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa



# BAB IV

## PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

# BAB IV

## PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI

### INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi anggaran dan pengelolaan PNBPN Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Riau Tahun 2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

#### 1. REALISASI DIPA 01

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp.	%	Rp.	%
1	Pengadilan Tinggi Riau	Belanja Pegawai	Rp 22.889.966.000	Rp 22.883.822.355	99,97	Rp 6.143.645	0,03 %
		Belanja Barang	Rp 3.958.914.000	Rp 3.958.894.797	100	Rp. 19.203	0%
		Belanja Modal	-	-	0	-	0%
		Total	Rp 26.848.880.000	Rp 26.842.717.152	99,98 %	Rp 6.162.848	0,02 %
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Belanja Pegawai	Rp 12,863,264,000	Rp 12,852,368,410	99,92 %	Rp 10,895,590	0,08 %
		Belanja Barang	Rp 2,458,764,000	Rp 2,324,456,171	94,54 %	Rp 134,307,829	5,46 %
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0,0%	Rp -	0%
		Total	Rp 15,322,028,000	Rp 15,176,824,581	99,05 %	Rp 145,203,419	0,95 %
3	Pengadilan Negeri Dumai	Belanja Pegawai	Rp 4,872,645,000	Rp 4,850,712,706	99,55 %	Rp 21,932,294	0,45 %
		Belanja Barang	Rp 1,933,757,000	Rp 1,932,419,631	99,93 %	Rp 1,337,369	0,07 %
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0,0%	Rp -	0%
		Total	Rp 6,806,402,000	Rp 6,783,132,337	99,66 %	Rp 23,269,663	0,34 %
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Belanja Pegawai	Rp 4,639,126,000	Rp 4,619,020,017	99,57 %	Rp 20,105,983	0,43 %
		Belanja Barang	Rp 1,264,624,000	Rp 1,264,605,866	100 %	Rp 18,134	0,00 %
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0%
		Total	Rp 5,903,750,000	Rp 5,883,625,883	99,66 %	Rp 20,124,117	0,34 %
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Belanja Pegawai	Rp 3,734,339,000	Rp 3,734,158,564	100,00 %	Rp 180,436	0,00 %
		Belanja Barang	Rp 1,750,165,000	Rp 1,750,022,530	99,99 %	Rp 142,470	0,01 %
		Belanja Modal	Rp 399,289,000	Rp 399,289,000	100,00 %	Rp -	0%
		Total	Rp 5,883,793,000	Rp. 5.883.470.094	99,99%	Rp. 322.906	0,01 %
6		Belanja Pegawai	Rp 3,361,528,000	Rp 3,350,992,154	99,69 %	Rp 10,535,846	0,31 %

	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Belanja Barang	Rp 1,470,773,000	Rp 1,469,958,537	99.94 %	Rp 814,463	0.06 %
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	0.00 %
		Total	Rp 4,832,301,000	Rp 4,820,950,691	99.77 %	Rp 11,350,309	0.23 %
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Belanja Pegawai	Rp 3.667.434.000	Rp 3.654.422.551	99.65 %	Rp 13.011.449	0,25 %
		Belanja Barang	Rp 1.777.626.000	Rp 1.776.708.884	99.95 %	Rp 917.116	0,05 %
		Belanja Modal	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%	0	0,00 %
		Total	Rp 5,495,060,000	Rp 5,481,131,435	99.86 %	Rp 13,928,565	0.30 %
8	Pengadilan Negeri Rengat	Belanja Pegawai	Rp 3,027,972,000	Rp 3,007,080,499	99.3%	Rp 20,891,501	0.7%
		Belanja Barang	Rp 1,503,070,000	Rp 1,416,267,608	94.2%	Rp 86,802,394	5.8%
		Belanja Modal	-				
		Total	Rp 4,531,042,000	Rp. 4. 423.348.107	97.6%	Rp. 107.693.893	2.4%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Belanja Pegawai	Rp 3,307,749,000	Rp 3,272,833,763	98.94 %	Rp 34,915,237	1.06 %
		Belanja Barang	Rp 1,251,733,000	Rp 1,246,563,598	99.59 %	Rp 5,169,402	0.41 %
		Belanja Modal	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	100,00 %	Rp -	0.0%
		Total	Rp 4,589,482,000	Rp 4,549,397,361	99.13 %	Rp 40,084,639	0.87 %
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Belanja Pegawai	Rp 2,903,330,000	Rp 2,883,204,413	99.3%	Rp 20,125,587	0.7%
		Belanja Barang	Rp 1,458,149,000	Rp 1,456,627,169	99.9%	Rp 1,521,831	0.1%
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0.0%	Rp -	0.0%
		Total	Rp 4,361,479,000	Rp 4,339,831,582	99.5%	Rp 21,647,418	0.5%
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Belanja Pegawai	Rp 3,022,785,000	Rp 2,997,852,029	99.,18 %	Rp 24,932,971	0,82 %
		Belanja Barang	Rp 1,340,667,000	Rp 1,340,066,350	99,96 %	Rp 600,650	0,04 %
		Belanja Modal	Rp -	Rp -	0	Rp -	0
		Total	Rp 4,363,452,000	Rp 4,337,918,379	99,41 %	Rp 25,533,621	0,59 %
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Belanja Pegawai	Rp 3,057,192,000	Rp 3,038,781,625	99.40 %	Rp 18,410,375	0.6%
		Belanja Barang	Rp 1,469,485,000	Rp 1,468,726,090	99.95 %	Rp 758,910	0.05
		Belanja Modal	Rp 870,589,000	Rp 870,574,778	100	Rp 14,222	0
		Total	Rp 5,397,266,000	Rp 5,378,082,493	99.64 %	Rp 19,183,507	0.36 %
<b>Total</b>			<b>Rp 94.334.543.000</b>	<b>Rp 93.900.430.095</b>	<b>99,80%</b>	<b>Rp 434.112.905</b>	<b>0.2%</b>

## 2. REALISASI DIPA 03

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	Pengadilan Tinggi Riau	Belanja Barang	Rp 235.514.000	Rp 235.483.834	99,99	Rp 30.166	0,01
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Belanja Barang	Rp 548,190,000	Rp 540,233,640	98.55	Rp 7,956,360	1,45
3	Pengadilan Negeri Dumai	Belanja Barang	Rp 228,600,000	Rp 228,547,955	99,98	Rp 52,045	0,02
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Belanja Barang	Rp 240,840,000	Rp 240,839,000	100 5	Rp 1,000	0,00



5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Belanja Barang	Rp 592,672,000	Rp 592,666,930	100.00	Rp 5,070	0.00
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Belanja Barang	Rp 232,500,000	Rp 222,484,000	95.69	Rp 10,016,000	4.31
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Belanja Barang	Rp 152,964,000	Rp 152,277,310	99.55	Rp 686,690	0,45
8	Pengadilan Negeri Rengat	Belanja Barang	Rp 151,100,000	Rp 146,198,000	96.8	Rp 4,902,000	3.2
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Belanja Barang	Rp 221,732,000	Rp 216,067,915	97.45	Rp 5,664,085	2.55
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Belanja Barang	Rp 148,360,000	Rp 146,302,300	98.6	Rp 2,057,700	7.2
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Belanja Barang	Rp 164,100,000	Rp 161,149,865	98,20	Rp 2,950,135	1,80
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Belanja Barang	Rp 257,350,000	Rp 251,540,419	97.74	Rp 5.809.581	2.3
<b>Total</b>			<b>Rp 3.173.922.000</b>	<b>Rp 3.133.791.168</b>	<b>98,73</b>	<b>Rp 40.130.832</b>	<b>1,27</b>

### 3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berikut rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 30. Realisasi PNBP Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Kode Akun								
		425131	425231	425232	425233	425239	425911	425912	425122	425765
1	Pengadilan Tinggi Riau	Rp 40,124,608	Rp. 150,000	Rp -	Rp -	Rp 4,670,000	Rp 0	Rp 28,741,169	Rp -	
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Rp 20,395,867		Rp 18,330,000	Rp 58,820,000	Rp 138,461,000	Rp -		Rp 1,265,000	
3	Pengadilan Negeri Dumai	Rp 8,266,520		Rp 1,930,000	Rp 7,090,000	Rp 16,601,000	Rp 7		-	
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Rp 15,321,404		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,837,350		Rp 7,012,500	
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp 57,623,220		Rp 1,010,000	Rp 8,890,000	Rp 24,546,000	Rp -		Rp 3,622,000	Rp. 38,776,916
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Rp 32,029,768		Rp 1,060,000	Rp 5,400,000	Rp 49,820,500	Rp -		Rp -	
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp.23.520.951		Rp 2,400,000	Rp 5,900,000	Rp 15,925,500	-		-	
8	Pengadilan Negeri Rengat	Rp 24,110,596		Rp 1,830,000	Rp 4,890,000	Rp 11,769,000	-		Rp -	
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Rp 24,297,714		Rp -	Rp 9,540,000	Rp 20,077,000	-		Rp -	
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	-		-	-	-	-		-	
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Rp 16,421,091		Rp 1,770,000	Rp 4,715,000	Rp 17,683,000	-		Rp 2,424,000	
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp 3,216,219		Rp 990,000 -	Rp 2,690,000	17,777,000	-		Rp -	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 241.806.399</b>	<b>Rp 150.000</b>	<b>Rp. 29.320.00</b>	<b>Rp. 107.935.000</b>	<b>Rp 317,330,000</b>	<b>Rp736.812.607</b>	<b>Rp 4,837,357</b>	<b>Rp 14,323,500</b>	<b>Rp. 38,776,916</b>

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana bangunan, Kendaraan Dinas, mesin non TIK, Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 meliputi tanah dan mesin Non TIK, Mesin TIK dan Prasarana Lainnya.

## 1. TANAH

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pengadilan Tinggi Maupun Pengadilan Negeri terus melakukan inventarisasi legalitas Kepemilikan seluruh BMN. Khususnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah

yang menurut ketentuan peraturan perundang – rundangan harus berstatus milik pemerintah Republik Indonesia. Berikut rincian progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2024 pada Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 31. Daftar Tanah

No	Satuan Kerja	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total
1	Pengadilan Tinggi Riau	5	0	5
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	9	0	9
3	Pengadilan Negeri Dumai	3	0	3
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	4	4	4
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	10	1	11
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	0	2
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	2	0	2
8	Pengadilan Negeri Rengat	9	-	9
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	3	0	3
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	7	0	7
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	4	0	4
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	2	0

## 2. TANAH & GEDUNG

Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan administrasi yang

melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Berikut rincian tanah dan gedung Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah sudah/belum PSP tahun 2024.

Tabel 32. Daftar PSP Tanah dan Gedung

No	SaTuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (m2)	Nilai (Rp)	Luas (m2)	Nilai (Rp)
1	Pengadilan Tinggi Riau	Tanah	11.795	55.600.370.000	10.000	40.000.000
		Bangunan	7.543	12.909.493.423		
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2932	9.700.327.000	0	Rp -
		Tanah Banguann Kantor Pemerintah	9939	18.096.921.800	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	681	4.636.941.000	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	890	2.926.406.000	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	195	314.105.000	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	557	991.506.000	0	Rp -

		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1336	2.035.229.000	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	299	455.489.000	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	665	930.318.000	0	Rp -
3	Pengadilan Negeri Dumai	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5370	Rp 13,812,634,338	0	Rp -
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4000	Rp 10,288,740,662	0	Rp -
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1850	Rp 3,263,400,000	0	Rp -
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8280	Rp 5,651,597,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah I	600	Rp 402,780,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah I	597	Rp 400,766,000	0	0
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah II	3000	Rp 1,689,000,000	0	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Tanah Kantor Utama	4.490	7.426.460.000		
		Tanah Zitting Plaatz SLP	766	1.250.457.000		
		Tanah Zitting Plaatz Duri	1.037	1.021.445.000		
		Tanah Rumah Negara	6.589	9.450.778.000		
		Bangunan Kantor UTAMA	940	1.359.000.000		
		Bangunan Tanah Rumah Negara	1.518	1.725.224.595		
		Bangunan Zitting Plaats SLP	150	278.878.000		
		Tanah Gedung Kantor SLP (hibah)			20.000	Rp 2,032,501,047
		Bangunan Zitting Plaatz Duri	250	Rp 86,124,089		
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Zitting Plaatz)	731	107.450.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15.820	39.733.600		
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5000	Rp 1.018.625.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9500	Rp 2.764.725.000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1538	Rp 6.411.098.667		
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	43	Rp 78.555.000		
		Bangunan Pos Jaga Permanen	16	Rp 20.721.000		
		Bangunan Pos Jaga Permanen	16	Rp 20.721.000		
		Bangunan Halte/Shelter	80	Rp 109.527.000		
		Bangunan Lainnya	15	Rp 20.536.000		



		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	Rp 207.373.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	Rp 207.373.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	Rp 120.968.000		
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	Rp 120.968.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 120.968.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 120.968.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 120.968.000		
		Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70	Rp 120.968.000		
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Tanah Bangunan Rumah Negara	575	Rp 987,735,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara	600	Rp 514,190,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara	620	Rp 531,330,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara	2100	Rp 1,801,309,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	Rp 3,512,000,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	798	Rp 686,035,000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	792	Rp 126,875,200		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	599	Rp 3,041,233,000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	70	Rp 38,214,000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	70	Rp 40,608,000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	70	Rp 40,275,000		
		Pagar Permanen	180	Rp 578,596,775		
9	Pengadilan Negeri Rengat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1832	Rp 6.118.213.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4948	Rp 5.521.399.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	460	Rp 909.681.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1093	Rp 350.088.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	400	Rp 127.800.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1686	Rp 554.348.000		

		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1445	Rp 261.904.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	805	Rp 470.125.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3405	Rp 7.770.789.000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	500	Rp 65.000.000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	900	Rp 3.884.892.000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	216	Rp 1.212.981.127		
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36	Rp 87.472.000		
		Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	70	Rp 198.525.000		
		Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	70	Rp 294.547.000		
		Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	70	Rp 345.789.000		
		Rumah Negara Golongan I Type D Permanen	54	Rp 305.993.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 129.655.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 138.843.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 129.655.000		
		Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	70	Rp 149.938.000		
		Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	54	Rp 119.142.000		
		Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	54	Rp 143.666.000		

		Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	54	Rp 66.464.000		
10	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Bangunan Gedung Kantor utama	1800 m2	Rp 15,254,478,912	0	Rp -
		Tanah kantor utama	20000 m2	Rp 7,135,840,000	0	Rp -
		Bangunan Gedung Arsip	424	Rp 2,181,241,000	0	Rp -
		Tanah Gedung Arsip	2840 m2	Rp 1,051,169,000	0	Rp -
		Tanah Mess	9878 m2	Rp 1,710,870,000	0	Rp -
		Musholla kantor utama	70 m2	Rp 250,000,000	70m2	Rp 250,000,000
		Musholla Gedung Arsip	114 m2	Rp 212,527,000	0	Rp -
		Pos Jaga	9 m2	Rp 25,000,000	9 m2	Rp 25,000,000
		Rumah Negara Golongan I Tipe B (Ketua)	120 m2	Rp 280,080,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Wakil Ketua)	70 m2	Rp 135,011,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	70 m2	Rp 116,762,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140 m2	Rp 274,126,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140 m2	Rp 270,910,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140 m2	Rp 269,651,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C (Kopel)	140 m2	Rp 275,089,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	70 m2	Rp 146,651,000	0	Rp -
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	70 m2	Rp 121,902,000	0	Rp -
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.352m2	Rp 336,670,264		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.364m2	Rp 337,102,262		
		Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.172m2	Rp 726,347,000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6.762m2	Rp 270,479,714		
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.001m2	Rp.958.576.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000m <sup>2</sup>	Rp. 1.930.370.000		
		Gedung Kantor	2.496m2	Rp. 24.597.449.882		
		Bangunan olahraga terbuka permanen	261 m	Rp. 520.370.000		
		Pos Jaga	6m2	Rp. 60.759.641		
		Mess Tempat Peristirahatan permanen	195m2	Rp. 371.126.000		



### 3. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) kendaraan Dinas pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan

Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah sudah/belum PSP tahun 2024

Tabel 33. Daftar PSP Kendaraan dinas

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	Kendaraan Roda 4	5	5	-
		Kendaraan Roda 2	4	4	-
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Kendaraan Roda 4	6	6	0
		Kendaraan Roda 2	13	13	0
3	Pengadilan Negeri Dumai	Kendaraan Roda 4	2	2	0
		Kendaraan Roda 2	8	8	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Kendaraan Roda 4	7	7	0
		Kendaraan Roda 2	3	3	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	7	7	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Kendaraan Roda 4	6	6	0
		Kendaraan Roda 2	5	5	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Kendaraan Roda 4	2	2	0
		Kendaraan Roda 2	5	5	0
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	5	5	0
9	Pengadilan Negeri Rengat	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	8	8	0
10	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Kendaraan Roda 4	2	2	0
		Kendaraan Roda 2	9	9	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Kendaraan Roda 4	3	3	0
		Kendaraan Roda 2	17	17	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Kendaraan Roda 4	1	1	0
		Kendaraan Roda 2	3	3	0

### 4. MESIN NON TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada

pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 34. Daftar PSP Mesin Non TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah (unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	910	905	5
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1,337	6	1331
3	Pengadilan Negeri Dumai	479	479	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	532	532	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	503	503	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	413	413	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	942	942	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	538	538	-
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	774	730	44
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	545	539	6
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	327	327	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	465	464	1

## 5. MESIN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin TIK pada Pengadilan Negeri sewilayah

hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024.

Tabel 35. Daftar PSP Mesin TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah (unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	165	164	1
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	301	12	289
3	Pengadilan Negeri Dumai	226	0	226
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	100	93	7
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	81	81	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	111	111	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	102	102	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	113	113	-
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	141	85	56
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	152	146	6
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	103	97	6
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	61	52	9

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 1. IMPLEMENTASI E-COURT

Ecourt adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Pada

tahun 2024, Pengadilan Tinggi Riau dan 11 (se belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau seluruhnya telah menerapkan E-Court. Rincian jumlah perkara pada Pengadilan negeri yang didaftarkan melalui ecourt, dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 36. Implementasi E-Court Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
1	Pengadilan Tinggi Riau	180	180	180	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	850	821	392	69	16	344
3	Pengadilan Negeri Dumai	198	181	66	27	1	87
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	230	230	160	40	1	29
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	231	231	64	16	2	149
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	132	132	77	16	0	39
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	127	127	54	8	3	62
8	Pengadilan Negeri Rengat	145	145	38	25	0	82
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	279	279	67	44	1	167
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	102	102	17	16	1	68
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	161	156	73	10	0	73
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	55	51	27	20	1	3

## 2. IMPLEMENTASI SIPP

Seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi

5.6.0 Penilaian implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun 2024 dijelaskan pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3. Implementasi Evaluasi Implementasi SIPP Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IMPLEMENTASI SIPP
5	>2000	IA	Pengadilan Negeri Pekanbaru	94.91%	97.37%	91.48%	99.42%	★★★★★ 95.80% (966.75)
5	501-1000	II	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri	95.49%	95.63%	92.14%	95.46%	★★★★★ 94.68% (947.01)
5	501-1000	II	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	96.02%	96.44%	93.22%	92.66%	★★★★★ 94.58% (949.42)
5	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Dumai	95.80%	95.91%	91.89%	92.88%	★★★★★ 94.12% (946.09)
5	1-500	II	Pengadilan Negeri Tembilahan	96.44%	98.08%	85.97%	94.03%	★★★★★ 93.63% (951.75)
6	1-500	II	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	95.13%	94.72%	88.13%	95.20%	★★★★★ 93.30% (934.99)
7	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Bangkinang	95.11%	94.42%	90.41%	90.68%	★★★★★ 92.66% (930.60)
8	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Pelalawan	95.97%	96.34%	89.15%	88.87%	★★★★★ 92.58% (934.12)
9	1001-2000	IB	Pengadilan Negeri Bengkalis	95.23%	94.01%	87.61%	92.42%	★★★★★ 92.32% (928.87)
10	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95.78%	93.91%	85.48%	90.27%	★★★★★ 91.36% (921.02)
11	1001-2000	II	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	83.89%	92.55%	88.06%	86.18%	★★★★☆ 87.67% (892.40)

## 3. IMPLEMENTASI e-BERPADU

e-Berpadu Mahkamah Agung adalah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan berkas pidana antar penegak hukum. Adapun tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk menghemat waktu dan biaya layanan perkara pidana, mewujudkan modernisasi administrasi

peradilan, menciptakan efektifitas dan efisiensi layanan perkara pidana serta meningkatkan layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Implementasi E-berpadu pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:



Tabel 37. Implementasi E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Permohonan									
		Penyampaian Berkas	Ijin Penggeledahan	Ijin Penyiwaan	Perpanjangan Penahanan	Penetapan Diversi	Perpanjangan Penahanan Tk Banding	Perpanjangan Penahanan MA	Pembantaran Penahanan	Ijin Pinjam Pakai Barang Bukti	Ijin Besuk Tahanan
1	Pengadilan Tinggi Riau										
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1630	757	2290	1615	6	304	0	0	2	28
3	Pengadilan Negeri Dumai	424	167	544	384	0	76	3	0	0	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	766	246	762	731	10	36	0	0	0	21
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	878	464	1046	799	11	239	32	0	9	1
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	653	281	1027	800	1	0	0	0	0	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	445	215	931	354	20	33	0	0	7	53
8	Pengadilan Negeri Rengat	420	173	666	506	5	0	0	0	0	145
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	590	325	761	612	3	25	0	0	0	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	590	325	761	612	3	25	0	0	0	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	445	309	720	483	29	21	0	4	0	572
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	212	150	427	254	2	59	0	0	10	1979
<b>Jumlah</b>		6753	3168	9652	6596	95	800	35	4	30	3514



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa



# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

   PENGADILAN TINGGI RIAU  [PT-RIAU.GO.ID](http://PT-RIAU.GO.ID)  +62853-5800-0101

## BAB V

# PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tinggi Riau merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik para pencari keadilan, telah menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara terus menerus pada masing-masing area

perubahan

Terdapat 2 komponen dalam penilaian pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu Komponen Pengungkit dan komponen hasil. Adapun 6 Area Pembangunan Zona Integritas antarlain:

- 1) Area I: Manajemen Perubahan
- 2) Area II: Penataan Tatalaksana
- 3) Area III: Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
- 4) Area IV: Penguatan Akuntabilitas
- 5) Area V: Penguatan Pengawasan
- 6) Area VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 38. Rekapitulasi Penghargaan Predikat WBK/ WBBM

No	Satuan Kerja	Jenis Predikat (WBK / WBBM)	Tahun Penerimaan Predikat WBK/WBBM	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Riau	WBK	2023	
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	WBK	2018	
3	Pengadilan Negeri Dumai	-	-	
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	WBK	2023	
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	-	-	
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	-	-	
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	-	-	
8	Pengadilan Negeri Rengat	-	-	
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	-	-	
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	-	-	
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-	
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	-	-	

### B. SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

- • Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan
- • Tangguh (AMPUH) adalah program dari
- • Direktorat Jenderal Badan Peradilan
- • Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI.
- • Keputusan Direktur Jenderal Badan
- • Peradilan Umum Mahkamah Agung
- • Republik Indonesia Nomor
- • 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang

Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum bahwa Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) mengacu pada : 1. Pedoman sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH); 2. Lembar Asesmen sertifikasi



Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH); 3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidakesesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain)); 4. Standar Operasional Prosedur (SOP); Pelaksanaan Asesmen AMPUH Pengadilan Tinggi Ke Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni

2024, sedangkan asesmen AMPUH Pengadilan Tinggi Riau oleh Tim Asesmen Dirjen Badilum dilaksanakan pada 16 Agustus 2024. Adapun nilai AMPUH berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 39. Rekapitulasi Penilaian AMPUH Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Type/Kelas	Nilai Ampuh	Predikat
1	Pengadilan Tinggi Riau	B	850,87	UNGGUL
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	750,24	UTAMA
3	Pengadilan Negeri Dumai	IA	766,25	UTAMA
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	803,72	UNGGUL
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	791,70	UTAMA
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	763,95	UTAMA
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	762,79	UTAMA
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	763,02	UTAMA
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	II	761,68	UTAMA
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	765,09	UTAMA
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	776,36	UTAMA
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	760,98	UTAMA

### C. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Seluruh satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilum No.114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Bangkinang memperoleh penghargaan dalam kategori Terbaik I dalam penilaian lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu

untuk Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri Kelas IB yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Hasil penilaian tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158/DJU/SK.KP3.4.4/XII/2024 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 40. Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum

No	Satuan Kerja	Peringkat	Kategori
1	Pengadilan Tinggi Riau	Terbaik I	Penilaian Layanan PTSP Pengadilan Tingkat Banding
2	Pengadilan Negeri Bangkinang	Terbaik I	Penilaian Layanan PTSP Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB

## D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan dan inovasi terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi informasi dan sarana prasarana

yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di lingkungan Peradilan. Berikut inovasi pelayanan publik yang ada di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 41. Inovasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau

No	Nama Satker	Jumlah Inovasi	Inovasi
1	Pengadilan Tinggi Riau	7	Smart PTSP, EVAKIP, e-Performance, Tuanku Online, SIKAD, Sinergi dan SATRIA
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	16	Aplikasi Antrian Panggilan Sidang, Aplikasi QR-Code Putusan, Aplikasi e-Monev dan Pelaporan Akreditasi Penjaminan Mutu, Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP Aplikasi Kasir, Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SIMLAPEG), Aplikasi DUK PN Pekanbaru, Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi, QR-Code Layanan PTSP Aplikasi Penilaian Personal, Aplikasi Survei Disabilitas, Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (APATUK), Aplikasi Salinan putusan Online, Aplikasi Eksekusi Online, Aplikasi EVAKIP, "SIGADIS TAMILUSIA (Siap Siaga Disabilitas, Wanita Hamil / Menyusu dan Lanjut Usia)"
3	Pengadilan Negeri Dumai	6	Reminder SIPP, Antrian Sidang, Si Jelas Adil, Alakum, Antrian Prioritas Online, Brosur Braile, QR-Code Layanan PTSP
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	15	Aplikasi Simayang, Aplikasi Antrian PTSP Secara Elektronik, Aplikasi Mext SIPP (Monitoring Eksternal SIPP), VIRAL (Virtual Layanan Asisten PN Bangkinang), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Aplikasi Antrian Persidangan, E-Brosur, TV Media, Center, PTSP Online dan POSBAKUM Online, Kom_NATRA, Personalitas, Superdata, Lampu, Maratun, Aplikasi Strong ZI, Si Pelaku PKP
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	11	Virtual PTSP, PAJERO (Petugas Antar Jemput Roro), PESO (Pesan Layanan Otomatis), Digitalisasi Layanan Informasi Kaum Disabilitas, E - Brosur, PN Bengkalis Info
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	Ojek Si-Anjas (Siap Antar Ke Jalan Lintas), Aplikasi Info Perkara dan denda tilang online
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	7	ALADIN (Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan), LAYANG BONO (Layanan Pengadilan Negeri Pelalawan Berbasis Online), ESAKU (Elektronik Surat Keterangan), Aplikasi Audio Pemanggilan Persidangan, E-Brosur, Antrian PTSP, Buku Braile Layanan PTSP
8	Pengadilan Negeri Rengat	9	Pojok Disabilitas, Video Running Text, Silanpandu, E-PTSP, E-Forizator, E-Form, Visian -Sarat, Digitalisasi informasi layanan pengadilan, Optimalisasi akses informasi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum pada pengadilan negeri rengat
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2	PTSP Online, Seputaran
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	3	Aplikasi Buku Tamu Elektronik, FTP Server, Priority Card (Kartu Prioritas).
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	OPASUS (Online Pengambilan Salinan Putusan), E-ISTANA
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	E-POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum secara Elektronik), APLIKASI POS-TER



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa



# BAB VI

## PENGAWASAN



PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

   PENGADILAN TINGGI RIAU  PT-RIAU.GO.ID  +62853-5800-0101



# BAB VI

## PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat

sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau meliputi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau, Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Riau, dan menindaklanjuti pengaduan

#### 1. PENGAWASAN DAERAH

Untuk melaksanakan pengawasan pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1286/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/9/2024 tanggal 11 September 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah:

1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun administrasi peradilan, untuk mengecek tindaklanjutnya.
2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan.
3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan Hasil Pengawasan kepada Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Riau sebagai Kordindator Pengawasan serta konsep laporan tindak lanjut hasil pengawasan

Adapun hasil pengawasan daerah pada Tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga ada beberapa formasi jabatan yang masih kosong.
3. Kendala lain adalah kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaruan dan pengadaan

Rincian Pengawasan pada Pengadilan Negeri yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dijelaskan pada dibawah ini

Tabel 42. Pengawasan daerah Tahun 2024

No	Nama Kegiatan Pengawasan	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Waktu	Tempat	Kesimpulan
1	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	20 Mei 2024 s/d 21 Mei 2024	PN Bangkinang	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
2	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	20 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024	PN Tembilahan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
3	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	20 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024	PN Dumai	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
4	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27 Mei 2024 s/d 28 Mei 2024	PN Siak Sri Indrapura	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
5	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Bengkalis	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27 Mei 2024 s/d 29 Mei 2024	PN Bengkalis	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
6	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Pasir Pengaraian	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27 Mei 2024 s/d 29 Mei 2024	PN Pasir Pengaraian	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
7	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	3 Juni 2024 s/d 4 Juni 2024	PN Pelalawan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
8	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	3 Juni 2024 s/d 5 Juni 2024	PN Rokan Hilir	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
9	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	3 Juni 2024 s/d 5 Juni 2024	PN Rengat	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
10	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	5 Juni 2024 s/d 7 Juni 2024	PN Teluk Kuantan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki

11	Pengawasan dan Asesmen AMPUH	PN Pekanbaru	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	10 Juni 2024 s/d 11 Juni 2024	PN Pekanbaru	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
12	Pembinaan	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	7 Oktober 2024	PN Dumai	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
13	Pengawasan	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	7 Oktober 2024 s/d 8 Oktober 2024	PN Dumai	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
14	Pengawasan	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	7 Oktober 2024 s/d 9 Oktober 2024	PN Tembilahan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
15	Pembinaan	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	7 Oktober 2024 s/d 9 Oktober 2024	PN Tembilahan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
16	Pengawasan	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	9 Oktober 2024 s/d 11 Oktober 2024	PN Rengat	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
17	Pembinaan	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	9 Oktober 2024 s/d 11 Oktober 2024	PN Rengat	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
18	Pembinaan	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	14 Oktober 2024 s/d 15 Oktober 2024	PN Bangkinang	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
19	Pengawasan	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	14 Oktober 2024 s/d 15 Oktober 2024	PN Bangkinang	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
20	Pengawasan	PN Bengkalis	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	14 Oktober 2024 s/d 16 Oktober 2024	PN Bengkalis	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
21	Pengawasan	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	16 Oktober 2024 s/d 17 Oktober 2024	PN Pelalawan	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
22	Pembinaan	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	16 Oktober 2024 s/d 17 Oktober 2024	PN Pelalawan	Secara umum sudah baik, namun masih ada



						yang perlu ditingkatkan
23	Pengawasan	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	21 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2024	PN Siak Sri Indrapura	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
24	Pembinaan	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	21 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2024	PN Siak Sri Indrapura	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
25	Pengawasan	PN Pasir Pengaraian	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	21 Oktober 2024 s/d 23 Oktober 2024	PN Pasir Pengaraian	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
26	Pengawasan	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 Oktober 2024 s/d 25 Oktober 2024	PN Teluk Kuantan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
27	Pembinaan	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 Oktober 2024 s/d 25 Oktober 2024	PN Teluk Kuantan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
28	Pengawasan	PN Pekanbaru	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 Oktober 2024 s/d 25 Oktober 2024	PN Pekanbaru	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
29	Pengawasan	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	29 Oktober 2024 s/d 31 Oktober 2024	PN Rokan Hilir	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki

## 2. PENGAWASAN BIDANG

Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1287/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/9/2024 Tanggal 11 September 2024 tentang

### 1. Bidang Teknis

- Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau
- Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara banding
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara banding
- Memantau dan memeriksa

Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas/Pembinaan bidang-bidang Pengadilan Tinggi Riau. Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah:

- pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding
- Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding
- Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara

- Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.
2. Bidang Kesekretariatan
- Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
  - Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

- Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas.
- Penerapan hukum acara dalam putusan PT Riau secara substansi sudah baik.
- Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik
- Pelaksanaan teknis persidangan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

- Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik.
- Penyelesaian minutasi berkas-berkas perkara banding, baik di Bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata maupun di Kepaniteraan Hukum telah berjalan baik.
- Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional.
- Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan
- Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik
- Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik
- Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi
- Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Tinggi Riau sudah berjalan baik

### 3. PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Riau Pada Tahun 2024 sebanyak 13 (lima belas) pengaduan dan sudah

ditindaklanjuti dengan penanganan pengaduan tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 43. Penanganan Pengaduan

Sisa Tahun 2023	Jumlah Pengaduan Masuk 2024	Jumlah Pengaduan Ditangani	Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani	Jumlah Sisa Pengaduan Waktu Berjalan
4	13	13	11	2

#### 4. EVALUASI

Pada tahun 2024 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang di Pengadilan Tinggi Riau maupun 11 (sebelas) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan briefing setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di bawahnya.
2. Membuat kontrak kinerja. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa satker tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan /kontrak kinerja pada tahun sebelumnya. Terhadap satker yang belum melakukan tindaklanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja akan diberikan sanksi dan dipantau secara intensif

3. Pada tahun 2024, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui:
  - a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan sejumlah 69 responden terhadap 9 ruang lingkup layanan Pengadilan Tinggi Riau dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4.00/ 99.88% dengan mutu pelayanan SANGAT BAIK.
  - b. Survey Presepsi Anti Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Korupsi di Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024, hasil Indeks Presepsi Korupsi terhadap 73 responden sebesar 4.00 / 99.90% dengan mutu presepsi BERSIH DARI KORUPSI.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK #bangga  
melayani  
bangsa

# BAB VII

## PENUTUP



PENGADILAN TINGGI RIAU  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131  
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

   PENGADILAN TINGGI RIAU  PT-RIAU.GO.ID  +62853-5800-0101

## A. KESIMPULAN

Selama tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri dibawahnya tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pelaksaaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Riau terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
4. Seluruh pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah menerapkan Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah menerapkan Implementasi *e-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), sehingga pendaftar

gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Selain itu Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau juga telah menerapkan *e-court* (proses persidangan secara elektronik) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau saat ini sudah mengimplementasikan Aplikasi e-BERPADU untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2024 pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau masih mengalami kendala antara lain:

1. Sumber daya manusia, khususnya staf yang ahli dibidang teknologi informasi masih kurang.
2. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang.
3. Gedung kantor yang tidak layak seperti Pengadilan Negeri Tembilahan, dan beberapa Pengadilan negeri belum punya gedung kantor sendiri seperti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
4. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara karena tidak tersedia anggaran rehab rumah dinas.

## B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau maka diperlukan:

- a. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas



